

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
Waktu : Pukul 10.00 WITA-Selesai
Tempat : Departemen Ilmu Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin

**ORGANISASI ETNIS TIONGHOA MAKASSAR PADA TAHUN
1945-1969**



SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar
Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**

Oleh:

INTAN DWI WAHYUNINGTIAS

Nomor Pokok: F81116501

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

SKRIPSI

**ORGANISASI ETNIS TIONGHOA MAKASSAR
PADA TAHUN 1945-1969**

Disusun dan diajukan oleh:

**INTAN DWI WAHYUNINGTIAS
F811 16 501**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada tanggal 18 Agustus 2021 dan dinyatakan telah memenuhi sejumlah persyaratan.



Konsultan I

Konsultan II


Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP.,
M.Hum.
NIP. 19571219 198903 1 001


Andi Lili Evita, S.S., M.Hum.
NIP. 19900111 201903 2 017

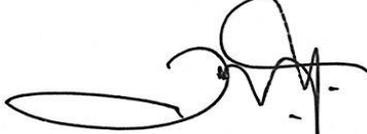
Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin**



Prof. Dr. Akif Duli, M.A.
NIP. 19640716 199103 1 010

**Ketua Departemen Ilmu Sejarah
Universitas Hasanuddin**


Dr. Nahdia Nur, M.Hum.
NIP. 19650321 199803 2 001

**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

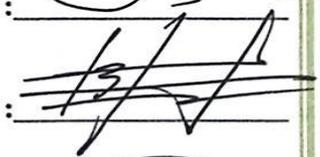
Pada hari Rabu, 18 Agustus 2021, Panitia Ujian Skripsi Departemen Ilmu Sejarah telah menerima dengan baik skripsi yang berjudul:

**ORGANISASI ETNIS TIONGHOA MAKASSAR
PADA TAHUN 1945-1969**

yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Ujian Akhir guna memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 18 Agustus 2021

PANITIA UJIAN SKRIPSI

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng,
LCP., M.Hum. | Ketua | : |  |
| 2. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. | Sekretaris | : |  |
| 3. Dr. Nahdia Nur, M.Hum. | Penguji I | : |  |
| 4. Drs. Abd. Rasyid Rahman, M.Ag. | Penguji II | : |  |
| 5. Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng,
LCP., M.Hum. | Konsultan I | : |  |
| 6. Andi Lili Evita, S.S., M.Hum. | Konsultan II | : |  |

LEMBAR KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Intan Dwi Wahyuningtias

NIM : F811 16 501

Departemen : Ilmu Sejarah FIB Unhas

Menyatakan bahwa isi skripsi ini adalah hasil penelitian sendiri. Jika di kemudian hari ternyata ditemukan Plagiarisme maka saya bersedia mendapat sanksi sesuai hukum yang berlaku dan saya bertanggung jawab secara pribadi dan tidak melibatkan pembimbing dan penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan tanpa paksaan ataupun tekanan dari pihak lain.

Makassar, 18 Agustus 2021
Yang membuat pernyataan,



Intan Dwi Wahyuningtias
F811 16 501



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Tidak ada yang patut saya ucapkan atas pemberian rahmat-Nya selain pengabdian dan penyembahan hanya kepada-Nya. Salam penghormatan bagi Nabi-Nabi terdahulu pembawa pencerahan risalah keteladanan terkhusus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan penutup dan penyempurna segala ajaran sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan meraih gelar sarjana pada program studi Ilmu Sejarah, Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda **Bambang Purwanto**, dan ibunda **Watiningsih** yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti yang tidak pernah lelah mendidik dan membesarkan penulis sehingga menjadi orang yang berguna dan hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu. Juga kepada kakakku tersayang **Desyta Natalia**, adikku tercinta **Muh. Ramadhan Putra**, **Bude** dan **Pade** saya serta keluarga Besar saya terima kasih atas segala support

baik moril, materil serta motivasi yang selama ini diberikan kepada penulis, semoga segala kebaikan senantiasa menyertai.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak akan pernah tercipta tanpa dorongan dan motivasi dari berbagai pihak yang rela memberikan segala bantuan, baik itu bantuan moril maupun materil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, LCP, M.Hum selaku pembimbing I dan A. Lili Evita, S.s., M.Hum selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membantu serta membimbing penulis dalam proses penulisan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala ilmu yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Almarhum Margriet Lappia Moka Lappia, S.S., M.S selaku Penasehat Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama hampir 4 tahun penulis menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah. Terimakasih telah menjadi penasehat akademik yang luar biasa hebat bagi penulis. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik disisi-Nya.
3. Drs. Dias Pradadimara, M.A.,M.S., selaku penasehat akademik penulis selama proses pemilihan judul dan penulisan skripsi. Penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala nasehat yang diberikan kepada peenulis.

4. Dr. Nahdia Nur, M. Hum., selaku Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin dan Drs. Abd. Rasyid Rahman, M. Ag., selaku sekretaris departemen. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf dosen pengajar di Departemen Ilmu Sejarah atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Departemen Ilmu Sejarah, yakni: Prof. Dr. Abd Rasyid Asba, M.A., Dr. Bambang Sulistyono Edi Purwanto, M.S., Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A., Dr. Ilham, S.S., M. Hum., Dr. Suriadi Mappangara. M.Hum., Nasihin M.Si., Dr. Muslimin AR Effendy, M.A., Dr. Abd. Rahmah Hamid, M.Si., penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas banyak nasihat dan ilmu yang telah diberikan selama masa pendidikan di bangku perkuliahan. Ilmu dan nasehat yang diberikan akan selalu penulis ingat. Serta Uddjie Usman Pati S. Sos., selaku kepala kesekretariatan Departemen Ilmu Sejarah.
5. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin beserta jajarannya terima kasih telah membantu segala jenis pengurusan berkas penulis hingga sampai pada tahap ini.
6. Bapak dan ibu yang telah bersedia untuk saya wawancarai dan memberikan informasi menyangkut skripsi ini, bapak Ir. Arwan Tjahjadi, Hengteng Soan, Halim Wijaya, Moehammad David Aritanto dan Dr. Ferdy Sutono, MS. Penulis ucapkan banyak

terima kasih karena berkat informasi yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Ryan Nursehan yang selalu menjadi support system bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas segala nasehat, doa, motivasi, perhatian yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih pula sudah menjadi pendengar yang baik dikala penulis merasa tertekan, putus asa dan mental yang sedang down.
8. Aisyah Ayu Astina. S dan Iin Dwi Annisa sahabat yang setia menemani penulis dari masa sekolah hingga sekarang. Terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dan semangat yang telah diberikan. Semoga kalian senan tiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang dan dilancarkan segala urusan kalian dalam mencapai cita-cita masing-masing. Untuk Aisyah sikyuw semoga lancar untuk pekerjaannya dan semoga segera menikah. Untuk Iin Jatol semoga segera menjadi traveller, lancar pendidikannya dan lancar pula hubungannya.
9. Teman seperjuangan di Arsip Nasional Abd. Rachman Halim AD, dan Burhanuddin yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam mengerjakan skripsi. Semoga kelak kita bisa kembali mengeksplor Arsip Nasional bersama.
10. Untuk Kak Alief Nur Situdju M.N. Nadjamuddin terima kasih penulis ucapkan karena selalu menjadi tempat berdiskusi

mengenai skripsi ini dan membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

11. Lembaga Lingkar yang telah memberikan pengalaman dan ilmu mengenai event kesejarahan dan pengalaman yang sangat berharga menjadi bagian dari kalian semua. Penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu yang diberikan kepada kak Teguh, Kak Anto, Ruth dan Salsa.
12. Senior terbaik Umi Syam. S.S., terima kasih atas segala nasehat, doa dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis. Penulis tidak akan melupakan kebaikan yang telah diberikan selama ini. Untuk Kak Umi semoga segala urusannya di lancarkan dan sehat selalu untuk keponakan tersayang Bibong.
13. Kepada sahabat yang selalu ada disaat penulis susah, senang dan membutuhkan bantuan dalam mengerjakan skripsi. Terima kasih penulis ucapkan untuk Dahviani Dahri, Muh. Zulvikar Anzar Parassa, Iksan karena tidak pernah bosan membantu segala keperluan penulis dan menghibur penulis disaat dunia tidak baik-baik saja.
14. Teman-teman seperjuangan di Departemen Sejarah angkatan 2016 yang telah menemani penulis dalam berproses dalam di bangku perkuliahan. Terima kasih penulis ucapkan untuk kenangan yang berharga yang telah diberikan. Kepada: Pitto, Eve, Siska, Nisa Ben, Erni, Jusni, Selvi, Sinar, Dewi, Dayen, Rahmadi,

Rais, Arul, Zul, Burhan, Alle, Arafah, Alam, Erwin Gutawa, Erwin S, Isman, Hendra, Arizal, Ammar, Akang. Serta kak Yuliana yang senantiasa membantu penulis melakukan pencarian sumber skripsi. Sahabat saya Kiki, Ega dan Tati terimakasih.

15. Rasti Nurfathiah SH yang senantiasa menghibur dan menyemangati penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

16. Last but not least. I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work for having no days off, for never quitting, for always being a giver and tyrna give more than I receive, tryna do more right than worng, for just being me at all times.

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan terima kasih atas doa dan dukungannya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran terhadap skripsi ini agar dikemudian hari penulis dapat membuat tulisan-tulisan yang lebih baik.

**Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamu Alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.**

Makassar, 25 Juli 2021

Intan Dwi Wahyuningtias

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
HALAMAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRACT.....	xiv
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Batasan Masalah.....	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	9
1.5 Metodologi Penelitian	9
1.6 Tinjauan Pustaka	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
BAB II Gambaran Umum Masyarakat Etnis Tionghoa Makassar	

2.1 Masyarakat Tionghoa di Makassar Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan (1945-1969).....	16
2.2 Pemukiman dan Populasi Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Kemerdekaan Hingga Awal Orde Baru (1945-1969)	32
2.3 Timbul dan Tenggelamnya Organisasi Etnis Tionghoa di Makassar	35
 BAB III Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi Etnis Tionghoa Makassar	
3.1 Cikal Bakal Pertumbuhan Organisasi Etnis Tionghoa di Makassar	40
3.1.1 Pendirian <i>Qiong Zhou She</i>	41
3.1.2 Pendirian <i>Tiong Ang Tong</i>	53
3.2 Peran Organisasi Etnis Tionghoa Bagi Masyarakat Tionghoa dan Masyarakat Lokal Makassar	59
3.3 Organisasi dan Keadaan Etnis Tionghoa di Makassar Pada Masa Orde Lama dan Permulaan Orde Baru	62
 BAB IV Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perkembangan Organisasi dan Kehidupan Etnis Tionghoa di Makassar	
4.1 Dampak Sosial Dari Kebijakan Pemerintah Terhadap Organisasi dan Kehidupan Etnis Tionghoa di Makassar	75
4.2 Dampak Ekonomi Dari Kebijakan Pemerintah Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa Di Makassar	96
 BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	105

5.2 Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
DAFTAR NARASUMBER.....	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	118

ABSTRAK

Intan Dwi Wahyuningtias (F81116501), dengan judul “Organisasi Etnis Tionghoa Makassar pada tahun 1945-1969” yang dibimbing oleh Dr. H. Muh. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum. dan A. Lili Evita, S.S., M.Hum.

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan organisasi-organisasi etnis Tionghoa di Makassar sejak 1945-1969. Keberadaan organisasi-organisasi tersebut di kalangan masyarakat etnis Tionghoa di Makassar pada masa itu merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi etnis Tionghoa di daerah perantauan. Hal tersebut disebabkan karena organisasi-organisasi itu telah memberikan sejumlah sumbangsih kepada mereka dalam melewati berbagai macam peristiwa yang terjadi pada masa perubahan situasi politik di Indonesia, tidak terkecuali di Makassar, pada 1945-1969. Selain itu, skripsi ini juga membahas kehidupan etnis Tionghoa di Makassar secara umum, dari segi sosial, budaya dan ekonomi.

Etnis Tionghoa di Makassar yang dibedakan menjadi Tionghoa Totok dan Peranakan, memiliki organisasi yang dapat mewakili identitas etnis mereka saat itu. Tionghoa Totok yang masih memegang teguh tradisi leluhurnya, membentuk organisasi *Qiong Zhou She*, yang didirikan oleh etnis Tionghoa Hainan. Sedangkan Tionghoa Peranakan yang merupakan keturunan campuran orang Tionghoa dan masyarakat lokal Makassar, mendirikan organisasi *Tiong Ang Tong*, yang terdiri dari etnis Tionghoa Peranakan di Makassar (kebanyakan dari etnis Tionghoa Hokkian). Pada saat terjadinya pergolakan pada masa peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, etnis Tionghoa yang tergabung di dalam kedua organisasi tersebut bersikap kooperatif dan mengikuti segala kebijakan atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal itu mereka lakukan agar dapat hidup tenang dan tidak dicurigai sebagai Komunis.

Kata Kunci: Makassar, etnis Tionghoa, organisasi, *Qiong Zhou She*, *Tiong Ang Tong*

ABSTRACT

Intan Dwi Wahyuningtias (F81111501), with the title "Makassar Chinese ethnic Organization in 1945 - 1969" which is supervised by Dr. H. Moh. Bahar Akkase Teng, Lc.P., M.Hum. and A. Lili Evita, S.S., M. Hum.

The research in this thesis aims to determine the development of ethnic Chinese organizations of Makassar from 1945-1969. The existence of these organizations in the ethnic Chinese community in Makassar at that time was one of the most important things for the Chinese in overseas areas. This is because these organizations have made a number of contributions to them in going through various events that occurred during the changing political situation in Indonesia, not least in Makassar, in 1945-1969. In addition, this thesis also discusses the life of the ethnic Chinese in Makassar in general, from a social, cultural and economic perspective.

The ethnic Chinese in Makassar, which are divided into Full-blood and Chinese Crossbreed, have organizations that can represent their ethnic identity at that time. The Full-blooded Chinese, who still adhere to the traditions of their ancestors, formed the Qiong Zhou She organization, which was founded by the Hainan Chinese. Meanwhile, the Peranakan Chinese, who are of mixed Chinese descent and the local Makassar community, established the Tiong Ang Tong organization, consisting of Chinese crossbreed in Makassar (mostly Hokkien Chinese). At the time of the upheaval during the transition of power from the Old Order to the New Order, the ethnic Chinese who were members of the two organizations were cooperative and followed all policies or regulations imposed by the government. They did this so they could live in peace and not be suspected of being Communists.

Keywords: Makassar, Chinese ethnicity, organization, *Qiong Zhou She*, *Tiong Ang Tong*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kedatangan bangsa-bangsa asing di Kepulauan Nusantara, tidak terkecuali di Makassar (Sulawesi Selatan), yang sudah terjadi sejak masa pra-kolonial, mengakibatkan terbentuknya hubungan perdagangan internasional antara masyarakat setempat dengan orang-orang luar (asing). Salah satunya adalah etnis Tionghoa (Cina), yang kedatangan mereka sebagai imigran ke Makassar dengan tujuan utama adalah untuk berdagang (ekonomi).

Etnis Tionghoa yang bermigrasi ke Makassar, mereka datang secara bergelombang dalam dua periode migrasi besar, yaitu dari abad ke-17 sampai akhir abad ke-19, dan yang kedua sejak akhir abad ke-19 hingga abad ke-20,¹ dengan tujuan utama adalah untuk berdagang (ekonomi). Etnis Tionghoa tersebut berasal dari sub-etnis yang berbeda dan dari wilayah atau daerah yang berbeda pula di Dataran Tiongkok. Karena hal itu, mereka memiliki dialek yang berbeda-beda pula satu sama lainnya. Namun, mereka secara keseluruhan berasal dari

¹ Heri Kusuma Tarupay, "Sejarah Sekolah Cina di Makassar 1908-1966: Proses Pembentukan Identitas Orang Cina," *Skripsi*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 1. Kedatangan mereka di abad ke-17, dari Dataran Tiongkok terjadi di masa akhir kekuasaan Dinasti Ming. Pada saat itu, Tiongkok mengalami masa paceklik yang parah, dan disintegrasi internal dalam tahun 1630-an dan 1640-an, yang ditandai dengan penurunan jumlah penduduk secara besar-besaran. Hingga akhirnya, hal tersebut berakhir dengan runtuhnya Dinasti Ming dari etnis Tionghoa (Han-Cina) di Tiongkok pada 1644, dan digantikan oleh Dinasti Qing dari etnis Manchu (1644-1912). Kedatangan kedua pada akhir abad ke-19 dan abad ke-20, terjadi pada masa akhir kekuasaan Dinasti Qing di Tiongkok.

wilayah bagian selatan dan tenggara Dataran Tiongkok pada periode ini, terutama dari wilayah pesisir pantai. Etnis Tionghoa pertama yang bermigrasi ke Makassar berasal dari Suku Hokkian, yang pada umumnya berasal dari Amoy (Xiamen), kota di pesisir pantai bagian tenggara Provinsi Fukien/Fujian. Orang Hokkian merupakan kelompok imigran Tionghoa pertama yang bermukim di Makassar dalam jumlah besar hingga abad ke-19, serta kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan pelaut.

Suku Hakka (Khek) yang berasal dari daerah pedalaman Provinsi Kwang-Tung/Guangdong (Meizhou) dan Fukien/Fujian (Longgan), menjadi imigran Tionghoa terbanyak dalam jumlah populasinya di Makassar setelah Hokkian. Pada umumnya, orang-orang Hakka merantau karena adanya faktor ekonomi. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai petani dan peladang di daerah asal mereka yang kering serta sering terkena bencana alam, sehingga menjadi imigran yang paling miskin di antara semua orang Tionghoa. Karena itu, mereka berniat untuk memperbaiki perekonomian mereka dengan mendatangi beberapa daerah di Kepulauan Nusantara, salah satunya ialah Makassar. Sedangkan etnis Tionghoa yang berbahasa Tiochiu, berasal dari pesisir pantai Swatow (Shantou), di sebelah Timur Kwang-Tung, berbatasan dengan Fukien, dengan ibukotanya adalah Tio Tjoe Foe.² Mereka umumnya berprofesi sebagai pedagang.

² Shaifuddin Bahrum, *Cina Peranakan Makassar Pembauran Melalui Perkawinan Antarbudaya*, (Yayasan Baruga Nusantara: Makassar, 2003), hlm. 37.

Berbeda pula dengan etnis Tionghoa berbahasa Kanton/Guangfu/Konghu (Kwang-Tung/Guangdong) yang bermigrasi ke Makassar sejak abad ke-19. Walaupun mereka bermigrasi ke Makassar hampir bersamaan dengan orang Hakka, namun keadaan ekonomi mereka pada umumnya jauh lebih baik karena merupakan para pedagang yang bermodal lebih besar. Sedangkan kelompok etnis Tionghoa yang bermigrasi dalam jumlah kecil berasal dari Pulau Hainan atau Hailan, selatan Guangdong dan dikenal sebagai perantau.³ Orang-orang Tionghoa yang awalnya berprofesi sebagai pedagang ini, dikenal sebagai pedagang kebutuhan rumah tangga, seperti alat atau peralatan rumah, kain, bahan makanan, dan lain-lain di pasar maupun toko-toko kelontong mereka.

Meskipun *linguafranca* di Daratan Tiongkok adalah Bahasa Mandarin, namun bahasa tersebut secara umum hanya dikuasai oleh kelompok elit masyarakat atau tokoh pemerintahan setempat saja. Masyarakat dalam kesehariannya berbicara menggunakan dialek daerah asalnya masing-masing, atau menggunakan Bahasa Melayu/bahasa lokal setempat sebagai pengantar jika berbicara di depan masyarakat umum. Karena itu, kelompok masyarakat imigran Tionghoa di Makassar ini memiliki bahasa yang berbeda dan sulit berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya.

Perbedaan bahasa di antara sesama imigran Tionghoa inilah yang kelak mengakibatkan berdirinya sejumlah organisasi etnis Tionghoa di Makassar yang berdasarkan pada asal daerah dan juga kesamaan dialek bahasa yang mereka

³ *Ibid*, hlm. 38.

tuturkan. Etnis Tionghoa di Makassar pada masa itu terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kelompok Masyarakat Tionghoa *Totok* dan *Peranakan*.

Masyarakat Tionghoa di Makassar kemudian mendirikan berbagai organisasi bersifat etnis yang berdasarkan pada asal kesukuan untuk membela kepentingannya masing-masing. Pada awal abad ke-20, sejumlah organisasi, baik yang bersifat sosial, politik, agama maupun etnis tumbuh dan berkembang pesat di sejumlah daerah di wilayah Hindia Belanda. Tidak terkecuali di Makassar, maka organisasi-organisasi etnis yang didirikan oleh masyarakat Tionghoa, memainkan peranan cukup penting dalam keberagaman kehidupan sosial di kota kolonial tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka merupakan salah satu etnis di Makassar yang menyadari betapa pentingnya mengorganisasikan diri dalam sejumlah organisasi, guna mencapai kepentingan bersama, antar sesama etnis Tionghoa. Organisasi-organisasi etnis tersebut pada awalnya merupakan sejumlah perkumpulan orang-orang Tionghoa yang bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain.

Walaupun mendapatkan *privilege* dari Pemerintah Hindia Belanda, namun pemerintah tetap tidak memberikan kebebasan terhadap etnis Tionghoa di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai larangan berpergian kemudian ditetapkan bagi etnis Tionghoa.⁴ Hal inilah yang membuat orang-orang Tionghoa (yang terdiri dari berbagai suku tersebut) mendirikan berbagai organisasi berdasarkan

⁴ Hak istimewa yang diberikan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada etnis Tionghoa, yaitu mengeluarkan peraturan izin tinggal (*wijkenstelsel*) dan izin perjalanan (*passenstelsel*).

etnisitas untuk membela kepentingan mereka, diantaranya seperti *Qiong Zhou she* dan *Tiong Ang Tong*. Pendirian organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan ini dilatarbelakangi oleh perasaan senasib sepenanggungan di antara para imigran dan keinginan untuk menolong sesama saudara sekampung halaman di tanah perantauan.

Qiong Zhou she, merupakan organisasi yang dibentuk oleh orang-orang Tionghoa totok dari Suku Hainan di Makassar, yang telah ada sejak 1921 dan pertama kali bergerak di bidang kerohanian (peribadatan) dan kedukaan (pemakaman). Namun pada tahun 1937, diresmikan sebagai organisasi dan pada masa Orde Baru berganti nama menjadi “Perkumpulan Hainan Makassar.” Sedangkan *Tiong Ang Tong*, merupakan organisasi yang dibentuk oleh kaum Peranakan di Makassar, dan berasal dari semua suku di Tiongkok, namun telah kawin-mawin dengan masyarakat lokal di Makassar. Sehingga, organisasi ini pun dibentuk guna membantu kaum Peranakan dalam bidang sosial dan kedukaan.⁵

Perkembangan organisasi-organisasi etnis Tionghoa tersebut kemudian mengalami kemajuan pada masa pasca-kemerdekaan (setelah 1945), seperti di masa pemerintahan Ir. Soekarno (Orde Lama) dengan kebijakannya yang memberikan kebebasan dalam berorganisasi. Namun, selepas berakhirnya kekuasaan Orde Lama (1950-1965), pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (sejak 1966), lalu melakukan berbagai kebijakan yang

⁵ Yerry Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 145.

mengekang terhadap masyarakat etnis Tionghoa. Dikeluarkannya Inpres No. 14 Tahun 1967 tentang Pelarangan Pelaksanaan Adat-Istiadat Cina oleh Rezim Soeharto, telah membuat etnis Tionghoa di Indonesia tidak dapat menjalankan aktivitas keorganisasian yang telah mereka bangun, namun mereka tetap diberikan kelonggaran pada bidang ekonomi.⁶ Padahal, organisasi yang mereka bangun selama ini berorientasi dalam berbagai bidang, seperti sosial, kebudayaan, pendidikan dan kesenian. Pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa di Indonesia terlibat dalam peristiwa G30S semakin memperparah keadaan saat itu. Mereka diawasi secara ketat sebagai tindakan *preventif* yang diambil pemerintah untuk mencegah munculnya komunisme.

Keadaan ini kemudian berdampak pada organisasi-organisasi etnis yang telah didirikan oleh orang-orang Tionghoa di Makassar sebelum masa kemerdekaan. Mereka tidak lagi diperkenankan untuk melakukan kegiatan apapun. Kegiatan keagamaan/kepercayaan Tionghoa hanya boleh dilaksanakan secara intern di dalam hubungan keluarga atau perorangan. Perayaan-perayaan pesta agama dan adat-istiadat dilakukan secara tidak menyolok di depan umum, melainkan dilakukan di dalam lingkungan keluarga atau marga. Pelarangan menggunakan aksara Tionghoa tradisional (*Hanzi*) dan mendirikan serta membangun klenteng juga dilakukan pemerintah, agar etnis Tionghoa tidak merasa dicurigai serta ditahan. Sehingga akhirnya, eksistensi dari sejumlah organisasi etnis dari orang-orang Tionghoa di Indonesia, tidak terkecuali di

⁶ Leo Suryadinata, *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia*, (Grasindo: Jakarta, 1996), hlm. 192.

Makassar, pun semakin meredup. Hal ini karena sudah tidak adanya aktivitas-aktivitas di dalam organisasi-organisasi etnis tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti terdorong untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai organisasi etnis Tionghoa di Makassar, terutama dua organisasi etnis Tionghoa yang masih eksis dan melakukan aktivitas keorganisasian, yaitu *Qiongzhou she* dan *Yayasan Abdi Sosial*. Selain itu, yang menarik untuk dikaji adalah bahwa kedua organisasi ini dibentuk berdasarkan suku yang berbeda antara etnis Tionghoa “Totok” dan “Peranakan.” Namun, keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mengurus hal terkait dengan adat-istiadat atau ritual tradisional etnis Tionghoa (terutama dalam hal kedukaan/ritual pemakaman adat).

1.2 Batasan Masalah

Pada penulisan penelitian ini, akan ditetapkan mengenai sejumlah batasan terhadap objek yang hendak dikaji, batasan-batasan yang dimaksud ialah batasan temporal (waktu) dan batasan spasial (tempat).

Batasan temporal dari penelitian dan penulisan sejarah ini adalah priode tahun 1945 hingga 1969. Hal tersebut didasarkan pada fakta, bahwa pada tahun tersebut (1945), Indonesia telah merdeka di masa pemerintahan Soekarno, dimana pada saat itu, terjadi perubahan struktur serta sistem pemerintahan di Indonesia. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan berbagai organisasi etnis Tionghoa di Indonesia, tidak terkecuali di Makassar. Kemudian penulisan akan berakhir pada 1969, tepatnya di masa Orde Baru, yaitu pemerintahan Soeharto yang

membatasi pergerakan etnis Tionghoa di Indonesia, juga karena terdapat larangan untuk berorganisasi (membentuk atau mendirikan organisasi). Dalam hal ini peneliti ingin menelusuri dan mengkaji dinamika orang-orang Tionghoa di Makassar dalam dua periode sejarah yang penting, yakni orang Tionghoa pada masa Orde Lama dan menjelang Orde Baru.

Batasan spasial dalam penelitian ini adalah Kota Makassar, Sulawesi Selatan khususnya daerah Pecinan yang merupakan tempat tinggal masyarakat etnis Tionghoa dan tempat organisasi *Qiong Zhou She* dan *Tiong Ang Tong* dibangun. Hal tersebut disebabkan karena di Pecinan, aktivitas-aktivitas dari sejumlah organisasi etnis Tionghoa di Makassar sedang berkembang dengan pesatnya. Bahkan ketika terjadinya sejumlah pergolakan saat periode transisi kekuasaan di Indonesia masa itu, dari pasca kemerdekaan hingga Orde Baru.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

1. Mengapa organisasi etnis Tionghoa bisa bertahan terhadap perubahan situasi politik 1945-1969?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

- a. Menjelaskan proses terbentuknya organisasi-organisasi etnis Tionghoa di Makassar sejak 1945-1969.
- b. Menjelaskan perkembangan organisasi-organisasi etnis Tionghoa di Makassar di tengah terjadinya perubahan zaman sejak 1945-1969.

- c. Menjelaskan situasi dan kondisi organisasi-organisasi etnis Tionghoa di Makassar yang mampu beradaptasi dan bertahan di dalam lingkungan sosial-politik yang senantiasa berubah sejak 1945-1969.

1.4.2 Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang aspek organisasi etnis Tionghoa di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat yang sama dengan peneliti, dalam artian memiliki ketertarikan dalam mengkaji kehidupan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia.
- c. Menambah kehesanah pengetahuan Sejarah Sosial.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam memaparkan tema yang akan dibahas, penulis dalam penelitian menggunakan metode penelitian sejarah dengan pendekatan analisis deskriptif analitis dan menggunakan sistem penulisan yang mengacu pada metode sejarah. Metode Penelitian sejarah dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai organisasi etnis Tionghoa di Makassar. Prosedur yang harus dilakukan dalam metode Penelitian sejarah meliputi: (1) pemilihan topic, (2) heuristik (pengumpulan sumber), (3) verifikasi (kritik sumber, kredibilitas sumber), (4) interpretasi (analisis dan sistesis), dan (4) historiografi (penulisan hasil penelitian).

Metode penelitian ini diawali dengan menentukan tema penelitian berdasarkan hasil bacaan dan kajian tersebut penulis menemukan beberapa organisasi bentukan etnis Tionghoa menurut daerah tempat asal mereka yang turut andil dalam kehidupan etnis Tionghoa di Makassar. Sehingga penulis mengajukan

judul dengan tema “Organisasi Etnis Tionghoa Makassar”. Pada tahap berikutnya, penulis melakukan pengumpulan data (heuristik), baik data primer maupun sekunder. Pada tahap ini dikumpulkan sumber utama dari kantor Arsip, baik dari Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta maupun dokumen dari Badan Arsip Dan Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber primer yang digunakan penulis adalah arsip laporan mengenai pernyataan ganti nama dan Surat pernyataan keterangan melepas kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok No Reg. 311, dan Surat Keputusan No. 154/v/1969 larangan mendirikan organisasi yang berbau Cina. Selain itu juga penulis melakukan wawancara dengan narasumber dari Etnis Tionghoa.

Data primer tersebut kemudian dihubungkan dengan sumber sekunder, seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan judul penulis. Sumber sekunder ini diakses dari berbagai situs internet, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin, perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin serta situs-situs jurnal lain seperti Jurnal Lensa Budaya, Jurnal Citra Lekha dan situs lain yang memuat jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian. Pada tahap ketiga, setelah sumber primer dan sekunder dikumpulkan maka dilakukan kritik sumber. Kritik sumber berfungsi untuk mengetahui data mana yang sesuai dengan judul yang telah ditentukan oleh penulis kemudian memilih sumber yang paling relevan untuk digunakan. Tahap ini disebut Verifikasi sumber. Adapun aspek yang dikritik pada tahap ini adalah mengenai keaslian sumber dan tingkat kebenaran informasi. Pada tahap berikutnya yaitu Interpretasi, pada tahap ini dilakukan analisis terhadap informasi yang telah diperoleh

berdasarkan sudut pandang ilmiah. Tahap kelima yaitu Historiografi, tahap ini merupakan tahap terakhir dengan merangkum semua hasil analisis menjadi sebuah tulisan ilmiah.

1.6 TINJAUAN PUSTAKA

Guna memperkaya sumber pustaka dalam penelitian ini, maka penulis selaku peneliti akan menggunakan beberapa sumber sejarah sebagai bahan literatur yang sesuai dengan topik pembahasan serta penunjang penulisan hasil penelitian. Adapun beberapa sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah:

Surat Keputusan No 154/V/1969. Sumber ini berisi tentang keputusan dari Pemerintah mengenai keturunan China/Tionghoa yang bertempat tinggal di Indonesia agar tidak mendirikan organisasi yang berbau China.

Shaifuddin Bahrum telah menulis buku yang berjudul *Cina Peranakan Makassar*. Dalam buku tersebut, diuraikan pembahasan menyangkut orang Cina/Tionghoa di Makassar secara umum, seperti asal usul kependudukan orang Cina di Makassar dan pola sosial serta budaya mereka. Kemudian ada pula penjelasan terkhusus dalam buku tersebut mengenai Cina Peranakan yang berada di Makassar, bagaimana etnis dari Peranakan ini mampu berbaur dengan masyarakat pribumi yang ada di Makassar.

Yerry Wirawan menulis buku tentang *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar*, yang menjelaskan mengenai kehidupan masyarakat Tionghoa di Makassar dari awal kedatangannya hingga abad ke-20. Yang sangat membantu penulis untuk mendapatkan beberapa informasi mengenai etnis Tionghoa yang

berada di Makassar dan informasi mengenai organisasi etnis Tiongoa serta keadaan politik rtnis Tionghoa.

Edward L. Poelinggomang, “Perdagangan Maritim Masyarakat Sulawesi Selatan,” dalam Dias Pradadimara dan Muslimin A.R. Effendy, *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*. Dalam buku ini, penulis dibantu untuk melihat kembali sejarah kedatangan bangsa-bangsa asing di Kepulauan Nusantara yang telah terjadi sejak masa pra-kolonial, yang mengakibatkan terjalinnya hubungan perdagangan internasional antara masyarakat setempat dengan orang-orang luar (asing), terkhususnya orang-orang Tionghoa (Cina).

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I. Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka atau kajian historiografi yang relavan, serta sistematika penulisan. Adapun dalam bab I ini dibuat berdasarkan pedoman penulisan dan pelaksanaan tugas akhir yang dibuat oleh Tim Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin

BAB II. Gambaran Umum Masyarakat Etnis Tionghoa Makassar

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai gambaran umum terbentuknya Masyarakat Etnis Tionghoa di Makassar, sejarah kedatangannya ke wilayah kota tersebut, pemukiman dan populasi etnis Tionghoa dan timbul tenggelamnya organisasi sosial etnis Tionghoa. Adapun Sub bab terdiri dari:

2.1 Masyarakat Tionghoa di Makassar Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan (1945-1969)

2.2 Pemukiman dan Populasi Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Kemerdekaan Hingga Awal Orde Baru (1945-1969)

2.3 Timbul dan Tenggelamnya Organisasi Sosial Etnis Tionghoa di Makassar

BAB III. Pertumbuhan dan Perkembangan Organisasi Etnis Tionghoa Makassar

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pertumbuhan organisasi etnis Tionghoa di Makassar dan perbandingan dari dua Organisasi Etnis Tionghoa di Makassar, yaitu *Qiongzhou she* dan Yayasan Abdi Sosial, serta langkah-langkah yang ditempuh untuk dapat bertahan dan mampu beradaptasi dalam lingkungan sosial-politik yang senantiasa berubah sejak 1945-1969. Adapun Sub bab dalam bab ini adalah:

1.1 Cikal Bakal Pertumbuhan Organisasi Etnis Tionghoa di Makassar

3.2.1 Pendirian *Qiong Zhou She*

3.2.2 Pendirian *Tiong Ang Tong*

3.3 Peran Organisasi Etnis Tionghoa Bagi Masyarakat Tionghoa dan Masyarakat Lokal Makassar

3.4 Organisasi dan Keadaan Etnis Tionghoa di Makassar pada Masa Orde Lama dan Permulaan Orde Baru

BAB IV. Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Perkembangan Organisasi dan Kehidupan Etnis Tionghoa di Makassar

Dalam bab ini berisi sub-bab tentang dampak sosial kebijakan pemerintah terhadap perkembangan organisasi dan kehidupan etnis Tionghoa Makassar serta dampak ekonomi dari kebijakan pemerintah terhadap kehidupan etnis Tionghoa Makassar. Adapun sub bab pada bab ini adalah:

4.1 Dampak Sosial Dari Kebijakan Pemerintah Terhadap Organisasi dan Kehidupan Etnis Tionghoa di Makassar

4.2 Dampak Ekonomi Dari Kebijakan Pemerintah Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Makassar.

BAB V. Penutup

Dalam bab ini akan dibahas mengenai intisari dari penelitian selama peneliti melakukan riset mengenai topic pembahasan peneliti yakni organisasi etnis Tionghoa Makassar 1945-1969 dan juga beberapa saran untuk penulis dan beberapa pihak yang terlibat.

BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA MAKASSAR

2.1 Masyarakat Tionghoa di Makassar Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan (1945-1969)

Mona Lohanda mengemukakan bahwa orang-orang Tionghoa di Indonesia sebagian besar berasal dari wilayah Fujian dan Guangdong.¹ Etnis Tionghoa yang datang pertama kali ke Makassar adalah Suku Hokkian yang berasal dari Provinsi Fujian bagian selatan, yang dikenal keahliannya dalam bidang perdagangan.² Kemudian ialah Suku Hakka/Khek dari pedalaman Guangdong,³ Suku

¹ Mona Lohanda, *The Kapitan Tionghoa of Batavia 1837-1942*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hlm. 10.

² Fujian merupakan daerah yang berperan penting di dalam sejarah perdagangan luar negeri China/Tiongkok. Selain perdagangan, peperangan sengit yang sering terjadi di Dataran Tiongkok yang telah mengakibatkan pengungsian besar-besaran orang Tionghoa ke kawasan Asia Tenggara. Lihat dalam Eddy Prabowo Witanto, “*Mengapa Pemukiman mereka dijarah, Kajian Historis Pemukiman Etnis Cina di Indonesia*,” dalam I. Wibowo (Editor), *Harga yang harus dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama kerja sama dengan Pusat Studi Cina, 2000), hlm. 205. Sejak dihapuskannya larangan perdagangan maritim di wilayah Tiongkok oleh Kaisar Kangxi dari Dinasti Qing terhadap perdagangan swasta, hal tersebut mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah etnis Tionghoa yang datang ke Kepulauan Nusantara, khususnya Makassar. Hal lebih lanjut mengenai orang-orang Tionghoa di Makassar dapat dilihat dalam Heri Kusuma Tarupay, “*Sejarah Sekolah Cina di Makassar 1908-1966: Proses Pembentukan Identitas Orang Cina*,” Skripsi Sarjana, (Makassar: Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 19.

³ Wilayah pedalaman Guangdong merupakan daerah yang kering dan tandus, sehingga membuat orang-orang dari Suku Hakka/Khek bermigrasi untuk memperbaiki perekonomian mereka. Selama periode 1850-1930, mereka adalah imigran yang paling miskin.

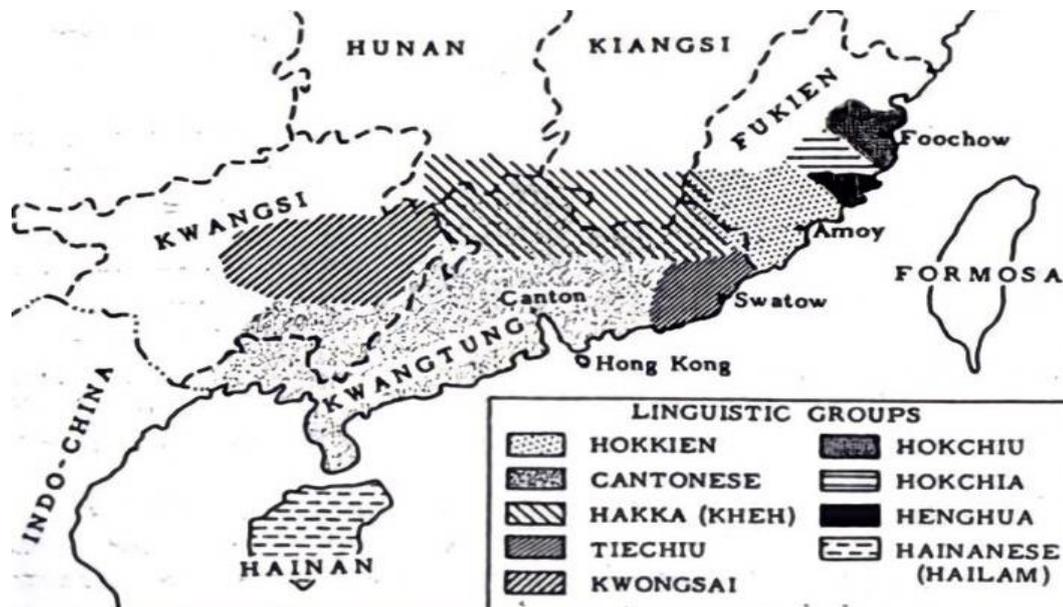
Kanton/Guangdong/Kwantong dari Guangdong (Delta Sungai Mutiara *Zhu-jiang San-jiao-zhou* dan sungai barat *Xijiang*),⁴ Suku Tiochiu/Tio Tjoe yang berasal dari daerah Chaozhou dan Swatow/Shantou,⁵ dan Suku Hainan/Hailan/Hainam dari Pulau Hainan di sebelah selatan Provinsi Kwan Tung/Guangdong.⁶ Beberapa kelompok Tionghoa lainnya yang bermigrasi ke Makassar dalam jumlah kecil, antara lain ialah Suku Hak Tjia, Hing Hua, Hok Tjioe, Ching Chiang, Hoklo, dan Tsoan Tsiu dari Kwang Tung/Guangdong. Selain di atas, imigran lainnya yang jumlahnya juga sangat sedikit dibandingkan dengan yang lain, yaitu berasal dari Hai Lok Hong, Loe Tjioe, Macao, dan Kioe Shen.⁷

⁴ Suku Kanton datang dengan membawa modal keterampilan pertukangan dan industri, karena di daerah asalnya telah berhubungan dengan bangsa Eropa serta dunia usaha di Hongkong yang merupakan daerah jajahan Britania/Inggris. Karenanya, mereka telah mengenal teknologi dan mesin-mesin muktahir ketika itu. Mereka banyak berusaha di bidang toko bangunan, besi dan alat-alat teknik, sebagai teknisi, industri dan restoran.

⁵ Suku Tiochiu juga dikenal sebagai pedagang.

⁶ Suku Hainan/Hailan/Hainam terkenal sebagai suku perantau yang tersebar di Nusantara, dimana mereka bekerja sebagai pedagang toko kelontong, alat kebutuhan rumah tangga, dan sebagainya.

⁷ Shaifuddin Bahrum, *Cina Peranakan Makassar, Pembauran Melalui Perkawinan Antarbudaya*, (Makassar: Yayasan Baruga Nusantara, 2003), hlm. 38.



**Peta. 2 Persebaran Suku dan Dialek Bahasa di Tiongkok Selatan-Tenggara
(Daerah asal leluhur orang-orang Tionghoa di Kepulauan Nusantara)⁸**

(Sumber: David G. Kohl, 1984:2)

Orang Tionghoa yang bermigrasi ke Makassar sebelum kemerdekaan, datang melalui tiga gelombang utama. Gelombang pertama, yaitu sekitar abad ke-16, gelombang kedua, yaitu sekitar abad ke-17, pada gelombang kedua ini, mereka datang bersamaan dengan bangsa Eropa (Belanda dan Portugis). Sedangkan gelombang ketiga, yaitu sekitar abad ke-19, dimana migrasi inilah yang melahirkan masyarakat “Tionghoa Totok” atau *Singkek*. Mereka datang

⁸ Peta tersebut menunjukkan persebaran suku dan dialek orang Tionghoa menurut kelompok tempat asal mereka di Tiongkok. Orang Tionghoa yang berada di Makassar berasal dari daerah Hokkian 福建, Hakka 客家, Konghu 廣府, Shantung 山東, Kwangtung 廣東, Cantonese 廣州, Hainan 海南. Para kelompok Tionghoa ini dibagi berdasarkan asal geografi sehingga cenderung saling tidak bercampur baur.

dengan membawa serta keluarganya. Kelompok ini lebih menjaga kedekatan kultural daerah asal mereka, sedangkan gelombang migrasi pertama dan kedua hanya golongan pria saja, yang kemudian menikah dengan wanita pribumi dan memunculkan ras campuran yang disebut sebagai “Tionghoa Peranakan.”⁹

Masyarakat Tionghoa yang menetap di Makassar terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok masyarakat Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan. Pada masa setelah kemerdekaan, tepatnya tahun 1946-1948, Kota Makassar yang memiliki sekitar 25.000 orang Tionghoa, sekitar 60% di antaranya merupakan orang-orang Tionghoa Peranakan.¹⁰ Kelompok ini memiliki perbedaan umum antara satu dengan yang lainnya, seperti bahasa, keyakinan agama, sistem kekerabatan, struktur masyarakat, pendidikan, pekerjaan, status kewarganegaraan dan titik tolak pandangannya. Namun, perbedaan yang mencolok dari keduanya adalah bahasa yang mereka gunakan sehari-hari di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat di masa itu.

Masyarakat Tionghoa yang datang pertama kali ke Makassar (perantauan) terdiri atas laki-laki, dimana mereka meninggalkan keluarga dan daerah asalnya. Masyarakat Tionghoa yang datang ke Makassar ini kemudian menikah dan berbaur dengan masyarakat setempat, sehingga terbentuklah orang-orang

⁹ Puspa Vasanty, *Kebudayaan Orang Tionghoa Indonesia*, dalam Koentjaraningrat (ed), *Manusia dan Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 355.

¹⁰ *Memori van Overgave. van de Assistant-Resident van Makassar*. N. C. Beudeker. Bestuursperiode 1 September 1946-12 Juni 1948. hlm. 1.

Tionghoa Peranakan. Darah keturunan Tionghoa peranakan tidak lagi 100% murni berdarah Tionghoa, melainkan tinggal 50% atau bahkan tinggal 5% saja, karena perkawinan itu sudah sangat jauh dari garis keturunan Tionghoa murni.

Masyarakat Tionghoa Peranakan,¹¹ memiliki darah campuran pribumi dan Cina/Tionghoa. Mereka sangat fasih dalam berbahasa daerah setempat (bahasa Makassar), bahkan menggunakannya sebagai bahasa ibu serta mengadopsi budaya lokal.¹² Secara umum, pada awal hingga menjelang pertengahan abad ke-20, Tionghoa Peranakan atau Cina Peranakan semakin berasimilasi ke dalam budaya tradisional masyarakat setempat, tempat mereka dan keturunannya menetap.

¹¹ Perlu diketahui, bahwa hingga abad ke-19, penggunaan istilah “peranakan” yang umumnya melekat kepada etnis Cina/Tionghoa, juga diartikan sebagai Muslim. Hal tersebut karena pada saat itu, sebagian besar dari masyarakat Cina/Tionghoa yang tinggal di Makassar di masa kolonial adalah Muslim, dimana mereka beralih menjadi penganut Islam ketika telah menetap di daerah perantauan di Kepulauan Nusantara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, atau mungkin berasal dari pelabuhan-pelabuhan di Daratan Tiongkok bagian selatan, dimana pengaruh pedagang Arab/Islam sejak abad ke-9 telah memunculkan sejumlah komunitas masyarakat Tionghoa Muslim yang taat. “Masjid China” yang ditunjukkan dalam Peta Kampung Wajo dan Kampung Melayu di Makassar pada 1818, merupakan cikal bakal Masjid Mubarrak/Masjid Butung, yang tetap merupakan wakaf dari keluarga imam peranakan hingga 1970-an. Lihat dalam Heather Sutherland, “Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Makassar: Perdagangan dan Kota di Abad ke-18,” *Kontinuitas dan Perubahan dalam Sejarah Sulawesi Selatan*, (Yogyakarta: Ombak, 2004), hlm. 33.

¹² Deng Am, “Cina Makassar Suatu Tinjauan Sejarah,” <https://www.kompasiana.com/amir/55001c65813311461bfa70e8/cina-makassar-suatu-tinjauan-sejarah>, 27 Agustus 2010, (diakses pada 5 Oktober 2020).

Golongan Tionghoa Peranakan lebih terbuka dalam hal menerima pengaruh kebudayaan, agama, dan kepercayaan setempat.¹³ Hal ini terjadi karena mereka tidak terlalu fanatik dalam memegang ajaran leluhur. Akibatnya, lambat laun dan tanpa mereka sadari, mereka telah melahirkan sebuah kebudayaan baru yang memadukan unsur kebudayaan Tionghoa dengan pribumi maupun dengan unsur kebudayaan asing lainnya, yang pada akhirnya membuat identitas mereka sendiri sebagai orang peranakan dan bukan orang pribumi tetapi juga tidak asing. Meskipun demikian, golongan Tionghoa Peranakan sebenarnya bukanlah merupakan golongan ras, tetapi merupakan golongan tersendiri yang didasarkan atas penggunaan nama keluarga, kebudayaan khas yang mereka wujudkan dan atas dasar identitas mereka.¹⁴

Kebudayaan Tionghoa Peranakan merupakan percampuran dari kebudayaan Cina/Tionghoa dengan kebudayaan tradisional Makassar. Hal tersebut terlihat dalam berbagai aspek kebudayaan dan kehidupan sehari-hari. Terdapat pula berbagai unsur kebudayaan yang tidak ditemukan dalam kebudayaan Cina maupun kebudayaan Makassar. Kebudayaan tersebut sangat khas di kalangan Tionghoa Peranakan, misalnya kata “*Oe*” yang berarti “iya” atau kue “*pao*” yang lazim dalam upacara pernikahan dan sebagainya.¹⁵

¹³ Umi Syam. “Buah Pena Ho Eng Dji Pencari Takdir (1921-1960),” Skripsi, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2012), hlm. 11.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

¹⁵ Saifuddin, op. cit., hlm. 22.

Golongan etnis Tionghoa Peranakan di Makassar diberi nama dengan sebutan “Cina Baba” atau “Cina Nona”¹⁶ untuk membedakannya dari Tionghoa Totok.

Orang-orang Tionghoa Peranakan di Makassar banyak ditemukan di Kampung Butung dan Kampung Melayu. Kebanyakan dari mereka ini adalah orang-orang Muslim Tionghoa yang telah beralih keyakinan setelah menetap di Makassar. Masalah dalam perubahan demografis di Makassar selama masa kolonial, menyebabkan kaburnya batas-batas etnis yang memiliki dampak yang

¹⁶ “Cina Baba” atau “Cina Nona” sudah menjadi istilah yang digunakan secara umum, khususnya berlaku di kawasan Asia Tenggara Kepulauan. Di Malaysia dan Singapura, istilah ini lebih dikenal dengan nama “Baba dan Nyonya,” yang digunakan untuk mengidentifikasi Masyarakat Tionghoa yang merupakan keturunan dari hasil perkawinan dengan penduduk pribumi (terutama dengan etnis Melayu). Mereka ini juga dikenal sebagai “Tionghoa Selat/Cina Selat,” karena kebanyakan dari mereka berdomisili di kawasan sepanjang pesisir pantai Selat Malaka di Negeri-Negeri Selat (Penang, Dinding, Malaka, dan Singapura) di Semenanjung Malaya pada era kolonial Britania. Kebanyakan dari mereka menunjukkan sifat lebih setia kepada Pemerintah Kolonial Britania daripada pemerintah Dinasti Qing (1644-1912) yang dianggap sebagai “pemerintahan orang asing (bukan orang Han-Cina/Tionghoa dan barbar” di Daratan Tiongkok maupun Republik Tiongkok setelahnya (1912-1949). Dalam beberapa sumber kolonial, mereka disebut dengan *geschoren Chinees* (orang Han-Cina/Tionghoa yang dipotong kuncirnya). Mereka sebagian besar tetap mempertahankan busana tradisional etnis Han-Cina dan adat-istiadat leluhur seperti pada masa Dinasti Ming (1368-1644), yaitu mengenakan gaya rambut jambul/berkonde tanpa kuncir rambut gaya Manchu yang dipaksakan bagi seluruh pria Tionghoa oleh Dinasti Qing, serta menampilkan atribut fisik tertentu yang merupakan campuran masyarakat pribumi dengan etnis Tionghoa. Selain istilah Baba/Baba’ dan Nyonya/Nona, istilah lain yang digunakan di Nusantara untuk menyebut orang Tionghoa Peranakan adalah “Tionghoa Benteng” (khusus bagi keturunan etnis Tionghoa yang telah terpengaruh oleh tradisi atau budaya Manchu dari Dinasti Qing di Tangerang) dan “Kiau-Seng” (*Qiao Sheng*) pada masa Hindia Belanda, yang dimana istilah terakhir ini merujuk pada keturunan Tionghoa yang terlahir bukan di Daratan Tiongkok serta sudah tidak dapat lagi berbahasa Mandarin dan kurang mengerti budaya Tionghoa/Han-Cina.

sama: melalui perkawinan atau menjadi pengikut kapitan tertentu,¹⁷ orang Wajo atau Tionghoa Peranakan Muslim dapat menjadi orang Melayu, atau orang Melayu dapat pula dianggap sebagai Tionghoa Peranakan. Dalam suatu kasus di Makassar, orang-orang Tionghoa Peranakan yang sebagian besar dari mereka adalah Muslim pada saat itu, memilih untuk memiliki letnannya sendiri dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan Kapitan Cina (yang merupakan orang Tionghoa Totok). Sementara itu, Kapitan Melayu maupun Kapitan Cina di Makassar pada masa itu, seringkali mengklaim kewenangannya atas Tionghoa Peranakan.¹⁸

Selain Tionghoa Peranakan, terdapat juga orang-orang Tionghoa Totok.¹⁹ Etnis Tionghoa Totok adalah etnis Tionghoa asli tanpa campuran darah dari etnis lain selain Cina/Tionghoa. Mereka kemudian mempelajari bahasa Makassar untuk percakapan sehari-hari, karena mereka harus hidup dan mencari nafkah di antara orang-orang yang bukan merupakan etnis Tionghoa. Tetapi, orang-orang dari etnis Tionghoa Totok ini tidak terlalu fasih menggunakan bahasa Makassar, seperti Tionghoa Peranakan.

¹⁷ Kapitan merupakan kepala atau pemimpin suatu golongan masyarakat tertentu dalam suatu wilayah perkampungan dalam pemerintahan kolonial di wilayah perkotaan.

¹⁸ Heather Sutherland, *op.cit.*, hlm. 34-35.

¹⁹ Pramoedya Ananta Toer, *Hokkian di Indonesia*, (Jakarta: Garba Budaya, 1998), hlm. 221. Orang-orang Tionghoa yang merantau ke Makassar menjelang 1945, merupakan satu unit keluarga, sehingga tidak bercampur dengan masyarakat setempat.

Tionghoa Totok sangat menjaga dan mempertahankan kemurnian darah keturunan Tionghoa mereka dengan membatasi diri dalam hal perkawinan. Mereka melakukan perkawinan dengan sesamanya orang keturunan Tionghoa Totok. Hal tersebut mereka lakukan untuk mempertahankan kemurnian darah Tionghoa yang mengalir dalam tubuh keturunan mereka, meskipun mereka sudah lahir dari beberapa generasi di Makassar.²⁰ Akibatnya, orang-orang Tionghoa Totok melarang anak keturunan mereka untuk menikah dengan orang yang bukan dari kalangan Tionghoa Totok.

Dalam kehidupan masyarakat Tionghoa Totok, mereka masih memelihara berbagai bentuk kehidupan yang beridentitas Tionghoa. Seperti dalam sistem kepercayaan, mereka masih setia menganut ajaran Konghucu/Konfusianisme, Tao/Taoism/Daoism dan Buddha/Buddhisme. Menurut mereka, kepercayaan-kepercayaan tersebut merupakan kepercayaan yang berasal dari nenek moyang mereka, yang seharusnya mereka jaga dengan baik. Masyarakat Tionghoa Totok juga masih mempertahankan hubungan tradisional dengan Daratan Tiongkok.²¹

Masyarakat Tionghoa Totok sangat memegang teguh budaya kealamian dari perubahan dengan bergantung kepada kebijaksanaan realitas untuk mencapai

²⁰ Saifuddin, *op.cit.*, hlm. 70.

²¹ Wang Xiang Jun. *Orang-orang Cina yang Mempengaruhi Kemerdekaan Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Solomon, 2010), hlm. 9.

kenyamanan bersama antar suku di suatu daerah.²² Masyarakat Tionghoa Totok di perantauan dalam berkomunikasi dengan sesamanya, selalu menggunakan bahasa Mandarin. Mereka juga memiliki kebiasaan menerjemahkan nama tempat atau daerah, makanan, dan lain-lain di tempat baru mereka menetap ke dalam bahasa Mandarin yang sesuai dengan dialek asal daerah masing-masing.²³ Contohnya, ketika masyarakat Tionghoa Totok di Makassar menyebut Ujung Pandang sebagai *Wu Rong Pan Dang* (烏戎潘當), dan Makassar sebagai *Wang Jia Xi* (望加錫), hingga pada masa kemerdekaan, masyarakat Tionghoa Totok tidak merubah kebiasaan mereka dalam pelafalan kata tersebut. Etnis Tionghoa Totok yang merupakan kelahiran di daerah setempat, lebih berhubungan dekat dengan Totok kelahiran Cina secara sosial, linguistik, kultural dan dalam aktivitas ekonomi.²⁴

Masyarakat Tionghoa Totok di Makassar pada umumnya membangun permukiman mereka secara berkelompok dan berbaris mengikuti jalur jalan. Mereka membangun kawasan perkampungannya di daerah Kampung Cina, yang

²² Wang Keping, *Ethos of Chinese Culture*, Dialihbahasakan oleh Nadya Andwiani, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm. 298.

²³ Hal ini ditujukan guna memudahkan mereka dalam melafalkan beberapa pengucapan atau kata dari bahasa setempat untuk kalangan mereka sendiri. Mereka punya konsistensi dan prinsip yang kuat terhadap daerah asal leluhur mereka. Sehingga, segala hal kata yang sederhana pun dari bahasa setempat juga mereka terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Meskipun begitu, tidak semua kata dari bahasa setempat/lokal yang mereka terjemahkan menjadi ejaan bahasa ibu mereka (bahasa Mandarin).

²⁴ Twang Yang Peck, *Elit Bisnis Cina di Indonesia dan Masa Transisi Kemerdekaan 1940-1950*, (Jakarta: Diadit Media, 2007), hlm. XXI.

sekarang menjadi Kampung Melayu. Akibatnya, secara tidak langsung masyarakat Tionghoa Totok tersebar di perkampungan tersebut.

Kehidupan orang-orang Tionghoa di Makassar selama era Orde Lama (1945-1965) berangsur-angsur membaik setelah berakhirnya Pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia. Pada masa Orde Lama, orang-orang Tionghoa Totok maupun Peranakan di Makassar memiliki profesi yang beragam, seperti pedagang, tukang kayu, tukang gigi, tukang emas, pengrajin perak, petani, mengusahakan kedai kopi/teh, penjaja kue-kue tradisional, pegawai swasta, tentara, polisi, dan lain-lain. Pedagang menjadi profesi yang paling banyak dilakoni oleh orang-orang Tionghoa di masa itu. Mereka bahkan berdagang hingga ke daerah-daerah pelosok di Sulawesi Selatan secara bebas, sehingga memiliki relasi dengan orang-orang lokal di wilayah pedesaan/perkampungan di luar Kota Makassar. Banyak orang-orang Tionghoa yang menjadi pedagang keliling hingga ke daerah perkampungan, sehingga menyebabkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian menikah dengan masyarakat lokal dan melahirkan generasi peranakan.²⁵ Adapula orang-orang Tionghoa yang membeli hasil bumi dari daerah pedalaman lalu membawanya ke Makassar untuk kemudian dipasarkan antar pulau/antar kota.

²⁵ Wawancara Tjap Lai Fuang (Albertus Tjap), 14 Juli 2021. Sebagai Tionghoa Peranakan turunan Hokkian, beliau mengutarakan kisah hidup keluarganya bahwa kakek dari ibunya yang seorang Tionghoa dan berprofesi sebagai pedagang keliling saat itu, kemudian bertemu dan berjodoh dengan neneknya yang merupakan masyarakat lokal di pinggiran Kota Makassar saat itu. Sementara itu, kakek dan nenek dari ayah Bapak Albertus Tjap berprofesi sebagai petani di areal persawahan yang sekarang menjadi Jalan G. Latimojong, Makassar. Pada masa itu, sebelum perluasan wilayah Kota Makassar pada 1971, kawasan pinggiran Makassar merupakan areal persawahan yang terhampar luas dan ditanami padi.

Meskipun masa Orde Lama dikenal sebagai masa yang relatif damai bagi kehidupan orang-orang Tionghoa di Makassar, namun hal tersebut tidaklah bertahan lama. Pada pertengahan 1960-an, menjelang berakhirnya Orde Lama di bawah Presiden Soekarno, terjadi inflasi ekonomi yang parah saat itu. Sewaktu terjadi krisis tersebut, kehidupan masyarakat tidak terkecuali orang-orang Tionghoa di Kota Makassar, begitu memprihatinkan akibat dampak yang ditimbulkan krisis saat itu yang tanpa pandang bulu. Kelaparan terjadi dimana-mana, sementara semua bahan pokok kebutuhan sehari-hari dijatah oleh pemerintah untuk semua penduduk kota. Setiap keluarga membawa kartu keluarga, dimana dengan berdasarkan kartu keluarga tersebut (termasuk keluarga-keluarga Tionghoa di Makassar), mendapatkan beberapa liter minyak tanah, minyak goreng, beras, sabun, dan gula.²⁶

Dalam segi kehidupan sosial atau bermasyarakat, orang-orang Tionghoa di Makassar pada masa Orde Lama tidak mengalami banyak permasalahan yang berarti, baik dengan masyarakat setempat maupun pemerintah kota saat itu. Orang-orang Tionghoa dewasa bekerja sesuai dengan keahlian masing-masing, sementara anak-anak mereka tetap bersekolah, terutamanya di Sekolah-sekolah Cina/Tionghoa. Bapak Albertus Tjap (Tjap Lai Fuang) sebagai salah satu narasumber menceritakan bahwa semasa beliau masih anak-anak dan remaja sebelum Orde Baru berkuasa, beliau masih sempat menikmati suasana keakraban satu sama lain dengan teman sebayanya dari kalangan non-Tionghoa atau

²⁶ Wawancara, Ir. Harry Kumala, 13 Juli 2021.

penduduk setempat. Suasannya begitu cair, sehingga menurut Bapak Albertus Tjap, mereka dapat menjadi sahabat karibnya saat itu.²⁷

Keadaan mulai berubah setelah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto mulai berkuasa di Indonesia. Pada masa permulaan Orde Baru setelah jatuhnya pemerintahan Orde Lama pada 1965, nasib orang-orang Tionghoa di Indonesia, baik Tionghoa Totok maupun Peranakan, berubah bahkan menjadi buruk. Sistem jatah bahan pokok kebutuhan sehari-hari untuk semua masyarakat dihapus oleh pemerintah, namun sayangnya rasa sentimen terhadap orang-orang Tionghoa di Indonesia memanas di masa awal Orde Baru, tidak terkecuali orang-orang Tionghoa di Makassar. Menurut Bapak Albertus Tjap, berdasarkan cerita-cerita lisan dari para tokoh sepuh Tionghoa di Makassar, mereka mengatakan bahwa hubungan antar etnis Tionghoa dengan pemerintah di masa Orde Lama lebih baik daripada masa awal Orde Baru.²⁸

Sejak Orde Baru berkuasa, semua orang-orang Tionghoa di Indonesia, termasuk di Makassar, yang berprofesi sebagai pedagang dilarang berniaga di wilayah pedesaan atau daerah tingkat II/kabupaten. Semua pedagang Tionghoa di desa-desa ditarik ke daerah tingkat I/kotamadya, dalam hal ini ialah ke Makassar untuk wilayah Sulawesi Selatan dengan maksud agar aktivitas mereka dapat dipantau atau dikontrol dari pengaruh paham komunis.

²⁷ Wawancara Tjap Lai Fuang (Albertus Tjap), 14 Juli 2021.

²⁸ Wawancara Tjap Lai Fuang (Albertus Tjap), 14 Juli 2021.

Pembatasan aktivitas orang-orang Tionghoa secara politik diberlakukan. Hal tersebut mengakibatkan “matinya” partisipasi orang-orang Tionghoa dalam perpolitikan ketika itu, sementara yang dapat diakses oleh mereka hanya dalam bidang ekonomi/perdagangan. Kebijakan tersebut membuat semua orang-orang keturunan Tionghoa, baik Tionghoa Totok maupun Peranakan, harus mengikuti peraturan atau kebijakan pemerintah di masa tersebut.²⁹ Meskipun dalam bidang ekonomi orang-orang Tionghoa dapat bergerak, namun mereka tetap dibatasi dengan dikeluarkannya peraturan yang melarang etnis Tionghoa untuk berniaga di wilayah pedesaan, sehingga perdagangan orang-orang Tionghoa berpusat di kota. Profesi atau lapangan pekerjaan untuk orang-orang Tionghoa juga dibatasi hanya dalam lingkup ekonomi/perdagangan. Hal ini menjadi kendala bagi orang-orang Tionghoa yang bukan berprofesi dalam bidang ekonomi/perdagangan. Namun karena tidak ada pilihan lain dan hidup harus berlanjut, maka yang tidak mahir dalam berdagang pun harus tetap menjalankan profesi baru tersebut.³⁰

²⁹ Perlakuan Pemerintah Orde Baru terhadap orang-orang Tionghoa saat itu tidak mengenal adanya Tionghoa Totok maupun Peranakan. Bagi Pemerintah Orde Baru, mereka tetaplah orang-orang “Cina.”

³⁰ Wawancara Tjap Lai Fuang (Albertus Tjap), 15 Juli 2021. Pada masa awal Orde Baru, orang-orang Tionghoa di Makassar yang bukan berprofesi sebagai pedagang, sebagian besar kemudian berubah Haluan menjadi pedagang. Para petani di pinggiran Kota Makassar dari kalangan Tionghoa Peranakan lalu beralih sepenuhnya menjadi pedagang. Tidak sedikit pula orang-orang Tionghoa di Makassar saat itu yang baru belajar keahlian baru dalam bidang dagang. Hal tersebut membuat ada orang-orang Tionghoa yang kemudian berhasil dalam bisnis perdagangan, namun tidak jarang pula dari mereka yang mengalami kegagalan, sehingga mencoba pekerjaan lainnya yang masih dapat sebisa mungkin mereka lakukan. Salah satu usaha dalam perdagangan yang cukup sukses bagi orang-orang Tionghoa saat itu adalah mendirikan usaha

Dalam kehidupan sosial, orang-orang Tionghoa di Makassar sejak masa Orde Baru mengalami “diskriminasi” bukan hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat, aparat, dan birokrasi setempat. Terdapat kemungkinan bahwa perlakuan negatif masyarakat lokal saat itu terhadap etnis Tionghoa di Makassar mendapatkan penguatan atau pengesahan dari pemerintah, dimana terjadi ketimpangan pelayanan birokrasi dan perlakuan aparat yang lebih banyak merugikan warga etnis Tionghoa. Hal tersebut membuat orang-orang Tionghoa sangat tidak nyaman atau lebih senang menghindari untuk berurusan dengan kantor-kantor birokrasi, seperti kantor kelurahan, untuk mengurus KTP, surat keterangan, surat izin usaha, Kartu Keluarga, dan lain-lain. Berhadapan dengan aparat keamanan pun juga sering memperoleh perlakuan kasar, sehingga untuk mempermudah urusan pun timbul praktek membayar (lebih banyak) jika ingin urusannya lancar.³¹ Sementara itu dari segi pendidikan, anak-anak etnis Tionghoa kerap mendapatkan *bullying* atau tindak kekerasan dari teman-teman atau kakak kelas/kakak tingkat mereka yang mayoritas ialah orang-orang lokal di Makassar.³²

rumah kopi/teh (yang hal ini memiliki dasar yang kuat dalam kebudayaan tradisional Tionghoa), perusahaan sirup, minuman bersoda, minyak gosok, usaha kue-kue tradisional Tionghoa, dan lain-lain.

³¹ Wawancara Tjap Lai Fuang (Albertus Tjap), 15 Juli 2021. Praktek membayar lebih agar urusan dengan birokrasi setempat menjadi lancar atau mudah sebenarnya merugikan orang-orang Tionghoa, terlebih dari kalangan keluarga kurang mampu.

³² Wawancara, Ir. Harry Kumala, 13 Juli 2021. Beliau menceritakan bahwa sewaktu menjadi mahasiswa di salah satu universitas di Makassar pada masa Orde Baru, orang-orang Tionghoa kerap dicemooh dengan kata-kata “Cina.” Pada saat dipelonco sewaktu Pekan Orientasi

Pada kehidupan sehari-hari, orang-orang Tionghoa di Makassar dibiasakan untuk dapat berbaur bersama masyarakat umum dengan tinggal di luar kawasan Pecinan setelah menikah. Di lingkungan tempat tinggal yang baru tersebut, dengan menyesuaikan kemampuan ekonomi masing-masing, orang-orang Tionghoa ini diharapkan mampu beradaptasi atau menerima kondisinya, meskipun daerah baru yang ditempatinya ini sangat rawan bagi keamanan mereka. Orang-orang Tionghoa ini harus belajar menerima perlakuan atau terkadang intimidasi fisik dari masyarakat setempat. Mereka dan juga anak-cucunya diajarkan untuk selalu dapat menjaga diri dengan menjaga kesopanan, mengalah dan menarik diri dari berbagai hal yang bisa mendatangkan masalah bagi diri sendiri maupun keluarga.³³ Keadaan yang menimpa orang-orang Tionghoa di atas pada masa Orde Baru tersebut terus berlanjut, meskipun pada akhirnya kemudian secara perlahan-lahan menjadi sedikit lebih baik.

Mahasiswa, mereka sering ditanya-tanya tentang status etnis mereka sebagai “Cina” oleh kakak tingkatnya yang kemudian berakhir dengan tamparan berulang kali.

³³ Wawancara Tjap Lai Fuang (Albertus Tjap), 15-16 Juli 2021. Beliau menceritakan bahwa ketika masih remaja, ia dan keluarganya tinggal di salah satu daerah yang rawan bagi orang-orang Tionghoa di Makassar saat itu. Rumahnya terkadang dilempari batu tanpa tahu penyebabnya dan siapa yang melakukannya. Bahkan suatu waktu ada rumah orang Tionghoa lainnya yang tinggal di lingkungan yang sama dengan Bapak Albertus Tjap saat itu yang dilumuri kotoran manusia pada bagian tembok atau pintu rumahnya. Daerah lingkungan rumah kedua orang tua Bapak Albertus Tjap merupakan daerah yang rawan akan perkelahian antar kelompok dan juga daerah yang dikenal sebagai sarang para pemabuk dan prostitusi sejak dari masa Orde Lama. Namun, beliau akhirnya mengerti bahwa hal-hal yang menimpa keluarganya maupun orang-orang Tionghoa lainnya pada masa itu lebih disebabkan karena adanya kecemburuan terhadap kondisi ekonomi orang-orang Tionghoa maupun dikarenakan adanya rasa antipati kepada orang Tionghoa.

2.2 Permukiman dan Populasi Etnis Tionghoa di Makassar pada masa Kemerdekaan hingga Awal Orde Baru (1945-1969)

Perkampungan masyarakat Tionghoa di Makassar pada masa sebelum Indonesia merdeka, terletak di *Templestraat* atau Jalan Sulawesi bagian selatan, *Muurstraat* atau Jalan Timor sebelah barat, Jalan Sangir, sekitar *Pakareppestraat* atau Jalan Lembeh dan Jalan Bali. Pada bagian utaranya berbatasan dengan Kampung Melayu yang berada di sekitar Jalan Sangir, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Arab, Kampung Kecak, Kampung Ende dan *Van Schelleweg* atau Jalan Irian, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Balandaya atau di sekitar Jalan Sumba, dan di sebelah barat berbatasan dengan wilayah Pelabuhan Makassar yang dibatasi oleh *Passarstraat* atau Jalan Nusantara.³⁴ Namun, belum diketahui berapa jumlah orang Tionghoa yang ada pada saat itu. Meskipun begitu, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya jejak historis seperti tulisan di batu nisan yang berbahasa Han Zi/Hanzi (aksara Tionghoa/Han-Cina) di areal pemakaman Tionghoa di sekitaran Jalan Sulawesi dahulu sebelum dipindahkan.

Permukiman Tionghoa tersebut lahir dari adanya kebijakan Pemerintah Hindia Belanda, yaitu kebijakan *wijkenstelsel*³⁵ dan *passenstelsel*.³⁶ Ketika

³⁴ Joice Gani, "Cina Makassar: Suatu Kajian tentang Masyarakat Cina di Indonesia (1906-1959)," Skripsi Sarjana, (Ujung Pandang: Jurusan Sejarah dan Arkeologi, Fakultas Sastra, Universitas Hasanuddin, 1990), hlm. 80.

³⁵ Peraturan yang mengatur bahwa orang Timur Asing yang berpenduduk Hindia Belanda, sedapat mungkin dikumpulkan di daerah-daerah terpisah di bawah pimpinan kepala masing-masing. Sistem *Wijkenstelsel* yang diterapkan Pemerintah Hindia Belanda menyebabkan

Indonesia merdeka pada 1945, masyarakat Tionghoa yang tinggal di dalam Perkampungan Cina tersebut memiliki kebebasan dalam menetap dan memiliki ruang gerak yang lebih bebas. Akibatnya, banyak orang-orang Tionghoa, terutama Tionghoa Peranakan yang bermukim di kampung-kampung lain di luar Perkampungan Cina. Beberapa orang Tionghoa memilih untuk tinggal di Kampung Maradekaya, Kampung Baru, Kampung Mangkura, Kampung Pattunuang, Kampung Butung, Kampung Kecak, Kampung Cangirak, Kampung Balanipa, Kampung Tampobalang dan Kampung Kalukuang.

Perkampungan masyarakat Tionghoa di Makassar merupakan deretan rumah-rumah yang berhadap-hadapan di sepanjang jalan. Masyarakat Tionghoa pada masa 1945-1969 memiliki rumah dengan ciri khas kuno dengan bentuk atapnya yang melancip pada ujung-ujungnya dengan ukiran-ukiran berbentuk naga. Sebagian pula terdapat rumah-rumah dengan banyak ukiran di tiang-tiang rumah, bagian langit-langit rumah dan sebagainya. Dalam perkampungan tersebut, terdapat pula empat klinteng bercorak Taois dan tiga klinteng marga dengan bentuknya yang khas dengan ukiran-ukiran tradisional Cina.

Dihapuskannya sistem pembatasan permukiman ketika Indonesia merdeka, menyebabkan terdapat perubahan dalam corak permukiman di antara orang-orang

orang Tionghoa terkumpul dalam sebuah daerah yang disebut Perkampungan Cina/Pecinan. Perkampungan Cina ini terdiri dari kawasan di sekitar *Chineststraat*.

³⁶ *Passenstelsel* adalah peraturan yang mewajibkan setiap etnis Tionghoa yang ada di Makassar yang akan berpergian untuk memiliki surat jalan. Peraturan ini sangat membatasi ruang gerak orang Tionghoa dalam melakukan aktivitasnya, terutama berdagang, karena mereka tidak memiliki kebebasan meninggalkan daerahnya untuk berdagang.

Tionghoa di Makassar. Masyarakat Tionghoa Totok lebih suka berkumpul di daerah pusat perdagangan, dengan ciri khas tinggal di rumah-rumah yang merupakan toko dan sekaligus juga tempat tinggalnya. Sebaliknya, masyarakat Tionghoa Peranakan lebih tersebar luas di seluruh Kota Makassar dan tinggal di rumah-rumah yang tidak sekedar untuk didiami, melainkan juga menunjukkan kesukaan akan rumah bergaya arsitektur Barat yang modern.³⁷

Jumlah populasi etnis Tionghoa di Makassar sesudah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada 1947, diperkirakan sebanyak 32.000 orang.³⁸ Orang-orang Tionghoa yang bermukim di Makassar ini kemudian membangun lembaga sosial atau organisasi dan budayanya sendiri sambil beradaptasi dan berasimilasi, berakulturasi dan berintegrasi dengan masyarakat lokal Makassar.³⁹ Berdasarkan laporan dari J.W. Klen pada 1947, penduduk di Makassar mencapai kurang lebih 165.000 jiwa yang di dalamnya terdapat masyarakat etnis Tionghoa 32.000 jiwa.⁴⁰

³⁷ Joice Gani, *ibid.*, hlm. 81.

³⁸ Heri Kusuma Tarumpay, *op. cit.*, hlm. 25.

³⁹ Gilbert Harmonic & Claudine Salmon, "Dunia Sastra dan Seni Masyarakat Tionghoa Makassar (1930-1950)," dialihbahasakan oleh Ida Sundari Husen, *Sastra Indonesia Awal, Kontribusi Orang Tionghoa*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2010), hlm. 467.

⁴⁰ Joice Gani, *op. cit.*, hlm. 22.

Perkembangan jumlah populasi masyarakat Tionghoa di Makassar pada dekade berikutnya pun sulit untuk dipastikan.⁴¹

2.3 Timbul dan Tenggelamnya Organisasi Sosial Etnis Tionghoa di Makassar

Masyarakat Tionghoa yang sudah cukup lama berada di Makassar, yang kemudian dengan berbagai diskriminasi yang didapatkannya, memunculkan gerakan-gerakan solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Bentuk solidaritas mereka ini terwadahi dalam sebuah organisasi sebagai alat perjuangannya. Organisasi yang mereka bentuk ini telah berdiri sejak zaman Hindia Belanda dan adapula yang didirikan pasca kemerdekaan Indonesia.

Mereka mendirikan berbagai organisasi sosial yang berdasarkan dengan asal kesukuan untuk membela kepentingan mereka masing-masing. Pada awal abad ke-20, sejumlah organisasi sosial dan politik tumbuh dan berkembang pesat di sejumlah daerah di wilayah Hindia Belanda. Tidak terkecuali di Makassar, maka organisasi-organisasi sosial yang didirikan oleh masyarakat etnis Tionghoa, memainkan peranan cukup penting dalam keberagaman kehidupan sosial di kota kolonial tersebut. Hal ini disebabkan karena mereka merupakan salah satu etnis di Makassar yang menyadari betapa pentingnya mengorganisasikan diri dalam sejumlah organisasi sosial, guna mencapai kepentingan bersama, antar sesama

⁴¹ Dias Pradadimara, "Dari Makassar ke Makassar: Aspek Demografi dan Politik Proses Etnisasi Sebuah Kota," *Jurnal Populasi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada*, 14(1), hlm. 88. Hal tersebut dikarenakan setelah sensus penduduk di Makassar pada 1930, informasi mengenai suku bangsa atau kelompok etnis baru ditanyakan lagi dalam sensus penduduk pada 2000.

etnis Tionghoa. Organisasi-organisasi sosial tersebut pada awalnya merupakan sejumlah perkumpulan yang bersifat ekonomi, kebudayaan dan nasionalis.

Pada sekitar 1907-1908, para imigran Tionghoa di Makassar membentuk beberapa perkumpulan awal perintis, yaitu perkumpulan tukang kayu dan batu (*Loe Pan Hong*) yang dibentuk pada 1907. Perkumpulan ini dapat ditemukan pada setiap wilayah yang memiliki pekerja kayu dan batu asal Guangdong. Kemudian perkumpulan kamar dagang *Tiong Hwa Siang Hwee* yang didirikan pada 1908, dibentuk untuk menjalankan kepentingan umum dan mengkoordinasikan perdagangan yang ada di Makassar. Perkumpulan *Soe Po Sia* atau *Liang Kioe Sia* yaitu perkumpulan yang dibentuk atas dasar sebagai taman bacaan, tetapi perkumpulan ini tidak dipandang oleh pemerintah kolonial saat itu. Selanjutnya ialah perkumpulan *Tiong Ang Tong* atau perkumpulan “Ruang Kedamaian Abadi,” merupakan perkumpulan untuk mengurus kematian atau penguburan. Perkumpulan ini adalah perkumpulan pertama yang didirikan di Makassar, seperti yang ada di Tiongkok, dan bertujuan untuk membantu keluarga-keluarga Tionghoa di Makassar yang kesulitan membeli peti jenazah dan mengadakan upacara penguburan. Organisasi *Tiong Ang Tong* ini merupakan organisasi yang dibentuk oleh etnis Tionghoa Peranakan. Perkumpulan selanjutnya adalah *Khong Seng Hwee* yang dibentuk untuk mengangkat pemikiran dan merayakan hari Konfusius.⁴²

⁴² Yerry Wirawan, *Sejarah Masyarakat Tionghoa Makassar*, (Jakarta: PT Gramedia, 2013), hlm. 145-149.

Mereka kemudian mendirikan berbagai organisasi sosial yang berdasarkan dengan asal kesukuan untuk membela kepentingan mereka masing-masing, yaitu perkumpulan *Kian Hok Tjioe Tjoang Koen Hwee Koan* yang didirikan oleh etnis Tionghoa Hokkian dan berkantor di *Pakareppestraat*. Kemudian masyarakat Tionghoa Hakka membentuk perkumpulan pada 1916 dengan nama *Siep Foo Fie Kwon*, lalu masyarakat Tionghoa Tiochui/Tiochiu (Fujian) mendirikan perkumpulan *Yongchun Huiguan* yang mengkhususkan diri dalam perdagangan hasil bumi. Selanjutnya, perkumpulan dari Hainan mendirikan *Qiong Zhou She* dan orang-orang asal Jiangsu pada 1923 mendirikan perkumpulan kecil bernama *Kang Tjioe Sia*. Perkumpulan ini bertujuan memberikan bantuan sosial dan keuangan kepada imigran dan mengelola sekolah-sekolah Tionghoa bagi anggota mereka.⁴³ Pada penelitian ini, penulis akan membahas mengenai dua organisasi Tionghoa di Makassar, yaitu organisasi *Tiong Ang Tong*, yang merupakan organisasi dari etnis Tionghoa Peranakan dan Organisasi *Qiong Zhou She* yang merupakan organisasi dari etnis Tionghoa Hainan atau Tionghoa Totok.

Dalam perjalanannya, perkembangan organisasi-organisasi sosial etnis Tionghoa di Makassar mengalami pasang surut. Beberapa organisasi yang dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda harus ditutup pada masa pemerintahan Pendudukan Jepang (1942-1945), dimana semua organisasi dilarang dan hanya boleh tergabung pada organisasi buatan Jepang terlebih untuk pendidikan masyarakat Tionghoa. Seluruh sekolah-sekolah buatan Belanda ditutup dan hanya sekolah buatan Jepang yang diperbolehkan.

⁴³ *Ibid.*,

Pemerintah Pendudukan Jepang di Indonesia tidak membedakan Tionghoa Totok dan Tionghoa Peranakan, mereka menganggap etnis tersebut sama saja yaitu etnis Tionghoa/Cina. Pemerintah Jepang ingin mencinakan kembali orang Tionghoa dan menutup semua organisasi-organisasi Tionghoa yang pernah berdiri dan menyatukan seluruh etnis Tionghoa ke dalam organisasi buatan Jepang. Sehingga, organisasi yang telah dibentuk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dianggap mati dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas apapun lagi. Tidak terkecuali dengan organisasi *Qiong Zhou She* dan *Tiong Ang Tong*, kedua organisasi tersebut juga dibubarkan dan para anggotanya harus masuk ke dalam organisasi buatan Jepang, yaitu *Wako Kyokai*.⁴⁴

Setelah Jepang mengaku atas kekalahannya dan digantikan oleh pemerintahan Soekarno (Orde Lama), Pemerintah Indonesia (Orde Lama) yang dibentuk setelah penyerahan kedaulatan, pada dasarnya mewarisi kebijakan yang ditinggalkan oleh pemerintah kolonial. Pemerintah Orde Lama memperbolehkan orang-orang Tionghoa untuk mendirikan kembali organisasi dan mengizinkan mereka terus aktif di bidang ekonomi sambil membatasi keberadaan mereka sebagai pejabat birokrat. Namun, pemerintah memperbolehkan dalam bidang politik sehingga sebagian dari mereka menjabat sebagai menteri.⁴⁵

⁴⁴ *Wako Kyokai* adalah suatu badan yang menjadi penghubung antara Pemerintah Jepang dan golongan Cina. Lihat Thoeng Siong Hien, "Pertip 10 Tahun," *Dalam 10 Tahun Pertip Makassar 1946-1956*, Makassar, Pertip, hlm. 15.

⁴⁵ Ririn Darini, "Kebijakan Negara dan Sentimen Anti Cina: Perspektif Historis," *Jurnal Mozaik Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4, hlm. 6.

Sedangkan pada masa Orde Baru, pemerintah membatasi pergerakan kepada orang-orang Tionghoa, Totok maupun Peranakan. Pemerintah berpendapat bahwa masyarakat Tionghoa harus berasimilasi ke dalam budaya Indonesia, dengan pelarangan agama, kepercayaan dan adat istiadat tradisi Tionghoa serta politik. Pemerintah juga melarang semua organisasi sosial etnis Tionghoa, seperti organisasi kaum Totok yaitu perhimpunan masyarakat berdasarkan tempat asal mereka (*Qiong Zhou She*) maupun organisasi peranakan (*Tiong Ang Tong*). Mereka hanya diperkenankan untuk bergabung dengan organisasi-organisasi yang didominasi oleh etnis non-Tionghoa.

Namun, pemerintah memberikan fasilitas kepada orang Tionghoa untuk kemajuan bisnis mereka karena pemerintah ingin mengerahkan potensi ekonomi Tionghoa di Indonesia dan mendorong mereka menarik lebih banyak modal dari Singapura, Hongkong dan pusat bisnis perantauan di Asia. Segala fasilitas pemerintah yang menguntungkan, mempercepat kebangkitan kembali dominasi Tionghoa dalam ekonomi Indonesia dan membuat perusahaan-perusahaan pribumi harus tutup.⁴⁶ Sehingga, hal ini kemudian mengakibatkan kesenjangan sosial di antara masyarakat Tionghoa dan masyarakat Pribumi Indonesia. Pada masa Orde Baru, masyarakat Tionghoa di Makassar tidak banyak melakukan aktivitas kebudayaan dan kepercayaan mereka, tanpa terkecuali organisasi mereka pun dianggap seperti mati, karena sudah tidak melakukan berbagai aktivitas yang biasa mereka lakukan sebelumnya.

⁴⁶ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*, (Jakarta: LP3ES 1989), hlm. 99.